



Buletin Parlementaria

Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022



Minim Komunikasi dan Tidak Adanya Kejelasan Sebabkan Prahara di Desa Wadas



3 Puan Maharani: JHT
Adalah Hak Pekerja,
Tinjau Ulang Aturan
Baru Pencairannya



7 Polemik JHT, Muhaimin
Minta Menaker Tiap
Ambil Keputusan
Libatkan Buruh



9 772614 339005



Minim Komunikasi dan Tidak Adanya Kejelasan Sebabkan Prahara di Desa Wadas



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat konferensi pers bersama Gubernur Jateng dan Kapolda Jateng. Foto: Jaka/nvi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, minimnya komunikasi pemerintah kepada warga terhadap rencana *master plan* Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak adanya kepastian pembayaran tanah, inilah yang menyebabkan terjadinya prahara di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Temuan itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI saat berdialog kepada sejumlah warga yang pro dan kontra maupun dari LBH di Desa Wadas.

“Parameter persoalan dasarnya adalah kepastian soal pembayaran bagi masyarakat yang sudah setuju tanahnya dijual dan komunikasi yang sampai hari ini belum *nyambung*

secara maksimal tentang persoalan proyek ini, antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak instansi yang terlibat langsung. Harapannya ke depan proyek ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat pun puas dan bisa menerima,” jelas Desmond saat konferensi pers bersama Gubernur Jateng dan Kapolda Jateng, di Mapolda Jateng, Semarang Jumat (11/2).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, berdasar keterangan di lapangan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) harus menjelaskan kepada warga terkait teknis pengambilan batu andesit yang tidak merusak lingkungan dan jalan masyarakat, karena mereka mengklaim punya teknologinya. “Kepala BBWS bilang untuk mengambil batu andesit punya

teknologi yang cukup sehingga tidak merusak lingkungan, mari kita kawal dan buktikan, mereka mengklaim sudah punya peralatan sendiri,” terang Desmond.

Desmond juga mengingatkan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, ke depannya harus memimpin dialog yang belum tersambung ini, berdiskusi dan mengevaluasi segala kegiatan-kegiatan agar lebih terukur ke depan. “Pak Ganjar tadi mengakui, memang ada kekurangan-kekurangan sementara atas kasus yang lalu, dan beliau tegaskan siap bertanggung jawab untuk memperbaiki ke depan. Agar berita-berita yang jelek tentang banyak hal bisa diselesaikan dan bisa membuat para pihak bahagia ke depannya,” harap Desmond.

Ke depan, lanjut Ganjar, juga akan dievaluasi pola-pola pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat, baik yang kontra maupun pro. Harapannya semua pihak tidak ada yang dirugikan, mengingat TNI dan Polri tidak mungkin bisa menyelesaikan hal-hal dasar yang harusnya menjadi tugas BPN, BBWS dan Gubernur. “Nah, hal-hal seperti ini ke depan yang akan dikoordinasikan oleh Pak Ganjar. Agar hal-hal yang dirasa kurang, bisa diantisipasi dengan baik. Ada usulan dari Komisi III, coba dihitung saja luasan wilayah yang sudah setuju tanahnya dijual, apakah sudah mencukupi batunya untuk Bendungan Bener, kalau ternyata cukup berarti yang tidak setuju ini *ngapain* tanahnya harus dijual lagi,” imbuh Desmond. ■

jk/sf

Puan Maharani: JHT Adalah Hak Pekerja, Tinjau Ulang Aturan Baru Pencairannya

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat banyak penolakan. Ia menegaskan, kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun tidak sensitif pada kondisi masyarakat.

Penolakan banyak terjadi lantaran Peraturan baru ini mengubah cara pencairan JHT. Lewat beleid itu, klaim JHT baru bisa dilakukan

100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).

“Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari Pemerintah melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh. Kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat khususnya para pekerja,” kata Puan, Senin (14/2).

Puan menilai, Permenaker yang baru dikeluarkan ini memberatkan para pekerja yang membutuhkan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19, tak sedikit pekerja yang kemudian dirumahkan atau bahkan terpaksa keluar dari tempatnya bekerja. “Banyak pekerja yang



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.
Foto: Kresno/nvl

mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha, atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Dan sekali lagi, JHT adalah hak pekerja,” tutur Puan.

Meski para pekerja yang terdampak PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hal tersebut dianggap tidak cukup. Puan menilai, JKP bukan solusi cepat bagi pekerja yang mengalami kesulitan ekonomi. “Program JKP sendiri baru mau akan diluncurkan akhir bulan ini. Untuk bisa memanfaatkannya, pekerja yang di-PHK harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang prosesnya tidak sebentar,” sebutnya. ■ sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMST (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patulli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Ruri Sari Budiati, Arif Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi

IT MEDIA DIGITAL

Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus saat menerima laporan terkait tujuh RUU Provinsi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimar Girsang. Foto: Arief/nvl

Paripurna DPR Setujui 7 RUU Provinsi

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi menjadi Undang-Undang. Ketujuh RUU itu adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan; RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat; dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelum memberikan persetujuan, dalam rapat tersebut Lodewijk menanyakan kepada ratusan Anggota DPR yang hadir secara *offline* dan *online*, apakah RUU tersebut disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. “Apakah tujuh RUU ini disetujui untuk dijadikan undang-undang?” tanya Lodewijk dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2). Pertanyaan Lodewijk pun disambut jawaban “Setuju” oleh seluruh peserta rapat dan pengetukan palu persetujuan.

Sementara itu sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimar Girsang dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk menata kembali dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia yang masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dia mengatakan, UU tersebut secara konseptual sudah tidak sesuai dengan Undang undang tentang otonomi daerah.

Junimart menjelaskan, beberapa waktu yang lalu dilakukan pengambilan keputusan kerja tingkat satu antara Komisi II DPR, Komite I DPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan HAM. “Secara bulat dan sepakat menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat dua untuk mengambil keputusan,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut. ■ hal/sf

RUU Keolahragaan Disetujui Jadi UU

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keolahragaan akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI. UU ini segera menggantikan UU lama, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Isu mayor dan minor sudah dibahas oleh Panja RUU Keolahragaan termasuk daftar inventarisasi masalah (DIM).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2) menyampaikan berbagai isu yang berkembang selama pembahasan. Panja membaginya menjadi isu mayor dan minor. Isu mayor seperti *big data* olahraga, industri olahraga, pendanaan olahraga, kelembagaan KONI dan KOI,

sumbangan badan usaha, dan lain-lain. Sementara yang masuk isu minor adalah pelatih olahraga, infrastruktur, narurisasi atlet, dan lain-lain.

“Dari isu krusial mayor dan minor tersebut, Panja melaksanakan berbagai kegiatan antara lain, Rapat Intern Panja Komisi X DPR RI, Rapat Panja (DPR dan Pemerintah), RDPU dengan pakar dan berbagai pemangku kepentingan olahraga, kunjungan kerja, dan konsinyering secara maraton, serta rapat tim perumus dan sinkronisasi,” jelas Dede dalam laporannya.

Dikatakannya, RUU Keolahragaan merupakan usul inisiatif DPR RI yang telah diputuskan Rapat Paripurna DPR RI pada 9 April 2021 lalu. Sementara soal DIM, Dede mengungkapkan, selama pembahasan ada lima DIM yang disepakati DPR dan pemerintah.

Misalnya, DIM tetap ada 191, DIM diubah redaksi 39, DIM diubah substansi 121, DIM dihapus 123, dan DIM usulan baru 387. Total DIM ada 861 selama Panja membahas RUU tersebut.

“Pembahasan RUU Perubahan UU SKN diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya, antara lain mengenai kelembagaan KONI-KOI, pendanaan (*mandatory spending*), olahraga berbasis teknologi (*IT Based Sport*), suporter, jaminan sosial, dan sarpras olahraga di kawasan industri. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami *deadlock*, sehingga dilakukan lobi,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Ada perdebatan sangat tajam selama membahas RUU Keolahragaan ini. Semua perdebatan itu, lanjut Dede, merupakan bagian dari memperbaiki kemajuan olahraga di Indonesia. “Pada akhirnya, perbedaan tersebut dapat diurai dan ditemukan akar masalahnya, sehingga pembahasan RUU Keolahragaan tetap dilanjutkan dalam bentuk Rapat Panja sampai Rapat Timmus/Timsin,” kilah Dede lagi. ■ mh/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat menyerahkan laporan terkait RUU Keolahragaan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Foto: Ojji/nvi

Ada Etika dan Tata Tertib dalam Setiap Rapat di DPR

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus mengungkapkan dalam setiap rapat atau persidangan di DPR RI ada tata tertib yang harus diikuti oleh semua pihak. Hal ini terkait keluarnya Dirut PT Krakatau Steel Silmy Karim dari ruang rapat, saat Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian.

“Sebenarnya saya tidak tahu persis saat rapat itu. Tapi dalam setiap rapat atau persidangan di DPR ada aturannya, ada mekanismenya, atau tata tertibnya. Nah yang saya dengar kemarin sama Anggota DPR begini, mungkin dia merasa tidak benar dan langsung memotong. Nah di situ ada tatibnya. Mungkin harusnya Pak Silmy tidak perlu seperti itu, kan beliau sudah sering ke (DPR) sini,” ungkap Lodewijk kepada awak media usai memimpin Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2).

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan saat di rumah, ketika orang tua bicara, anak diajari untuk mendengarkan terlebih dahulu. Baru kemudian bicara ketika sudah dipersilahkan. “Ada mekanismenya. Begitupun ketika rapat dan sidang di DPR, pimpinan akan memberikan kesempatan untuk bicara atau menjelaskan,” tandas Lodewijk.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi kepada wartawan menjelaskan, pada Senin (14/2), ia memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE

Kementerian Perindustrian dan Dirut PT Krakatau Steel Silmy Karim. Dalam rapat itu membahas sejumlah hal, dari banjirnya impor baja hingga penutupan blast furnace dan mangkraknya smelter milik Krakatau Steel di Kalimantan Selatan.

Perdebatan berawal ketika rapat tersebut membahas penutupan *blast furnace*. Dimana dari paparan Dirjen ILMATE diketahui butuh 5 *furnace*. Sementara yang tersedia hanya satu, dan itupun oleh Silmy dikatakan gagal, rugi dan sebagainya. Dan penutupan tersebut dianggap tidak selaras dengan semangat Presiden Jokowi untuk peningkatan Industri Baja dalam Negeri, karena Indonesia kaya bahan baku besi dan baja.

Sayangnya, mendengar pertanyaan Pimpinan dan beberapa Anggota Komisi VII tersebut, Silmy langsung bersikap reaktif, dengan langsung menjawab tanpa

terlebih dahulu menunggu arahan dan waktu berbicara dari pimpinan rapat. Padahal dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, terutama pasal 294 bahwa anggota rapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat. Dan tatib tersebut sejatinya juga termasuk bagian dari etika secara global yang berlaku di masyarakat.

Sikap reaktif yang berlebihan tersebut dinilai sebagai sikap yang tidak beretika dan tidak menghormati rapat atau persidangan di saat itu. Tak berlebihan jika kemudian Pimpinan rapat mempersilahkan Silmy untuk meninggalkan ruang rapat. Hal itu selain untuk menjaga marwah persidangan atau rapat yang notabene merupakan amanah undang-undang dalam menjalankan tugas dewan, juga semata untuk menjaga kelancaran jalannya rapat. ■ ayu/sf

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk F. Paulus. Foto: Faisal/nvi



Polemik JHT, Muhaimin Minta Menaker Tiap Ambil Keputusan Libatkan Buruh

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk melibatkan pimpinan buruh tiap kali ambil keputusan, termasuk mengenai polemik Jaminan Hari Tua (JHT). Diketahui, serikat buruh di beberapa daerah hari ini secara masif melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan JHT yang hanya bisa dicairkan saat usia 56 tahun.

Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Serikat buruh menilai kebijakan tersebut sangat merugikan karena tidak bisa mendapatkan bantuan saat buruh diberhentikan (PHK) atau mengundurkan diri dari pekerjaannya, sebelum usia 56 tahun.

“Saya kira Bu Ida (Menaker), saya minta untuk kumpulan semua pimpinan serikat buruh ditanya pendapatnya. Sekali lagi setiap ambil keputusan libatkan pimpinan buruh agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Gus Muhaimin kepada awak media, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).

Menurut Menaker di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, terjadi miskomunikasi antara pihak buruh dengan Menaker saat ini. Bahwa, JHT sebagai turunan dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004, memang ditujukan untuk jaminan saat hari tua agar mendapatkan bantuan dana. “Wajar kalau menerimanya di masa tua. Karena kalau dicairkan masa kapan pun, tak terbatas, masa tuanya tidak ada bantuan.



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Foto: Andri/nvl

Oleh karena itu, namanya juga JHT ya dapatnya saat masuk hari tua,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan saat dirinya sebagai Menaker pun rata-rata dana JHT itu sudah habis saat belum memasuki usia tua. Padahal, tabungan usia tua itu, berdasarkan kajian, ditujukan agar saat pensiun masih punya cadangan dan simpanan dana. Sehingga, Muhaimin menilai bisa saja aturan tersebut dikembalikan ke awal, yaitu JHT tersebut bebas diambil kapanpun seperti saat ini.

“Tapi kita lihat saja, pimpinan-pimpinan buruh kan bisa saja mengumpulkan pendapat untuk menyampaikan apakah akan ada perubahan atau tidak. DPR akan sampaikan ke pemerintah kalau memang itu kuat permintaannya, tidak spontan, atau misunderstanding ya tidak masalah bisa saja dikembalikan diambil bebas seperti sekarang,” tutup

legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut.

Diketahui, persoalan pengaturan pencairan dana JHT saat usia 56 tahun ini juga pernah terjadi saat periode pertama Presiden Jokowi. Saat itu, Jokowi menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2015. Aturan itu menyebut JHT BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair saat peserta memasuki usia 56 tahun.

Pada 12 Agustus 2015, pemerintah menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2015. Peraturan itu menyatakan JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan sebulan setelah peserta keluar dari perusahaan. Menaker Hanif Dhakiri menindaklanjuti aturan itu dengan menerbitkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Tujuh tahun setelahnya, Menaker Ida Fauziyah, menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Aturan baru itu kembali mencantumkan syarat usia 56 tahun dalam pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. ■ rdn/sf

Komisi I Setujui Reaktivasi Hubungan Diplomatik RI - Sudan Selatan

Komisi I DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk mereaktivasi pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan. Kesepakatan tersebut menindaklanjuti Surat Presiden atau Surpres yang diterima DPR RI.

Persetujuan terhadap usulan pemerintah melakukan reaktivasi hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/2).

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Komisi I DPR RI mendukung usulan Pemerintah terkait rencana pembukaan hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan. Pemberian pertimbangan ini akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat membacakan kesimpulan rapat.

Sebelumnya dalam rapat, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan dengan usulan reaktivasi hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan. “Memang sudah aktifnya Sudan Selatan di PBB maupun di Uni Afrika, saya kira tidak ada alasan kita menunda hubungan diplomatik kita dengan Sudan Selatan. Jadi pendapat Fraksi PDI-Perjuangan, kami setuju dengan reaktivasi ini,” kata Junico.



Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI saat berbincang dengan Menteri Luar Negeri. Foto: Jaka/nvl

Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dari Fraksi Golkar juga menyampaikan kesetujuannya terhadap usulan membuka hubungan diplomatik tersebut. Anggota Komisi I Yan P Mandenas mewakili Fraksi Gerindra menyatakan setuju dengan usulan itu. Ia berharap, agar hubungan dan dukungan Indonesia terhadap Sudan Selatan terus bisa dilakukan. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai PAN, Fraksi Partai PKS, dan Fraksi Partai PKB juga menyampaikan persetujuannya.

Dalam pemaparannya, Menlu Retno menyampaikan keadaan Sudan Selatan

saat ini sudah kondusif dan aman untuk melakukan hubungan diplomatik. Sudan Selatan sekarang sangat maju perkembangannya, terutama terus meningkatnya perekonomian hingga mencapai 9,5 persen pada tahun 2019/2020.

“Sudan Selatan pun sekarang kaya akan sumber daya yang dihasilkan seperti penghasil cadangan minyak terbesar ke-3 di Afrika. Indonesia sedang mencoba melakukan kerja sama Sudan Selatan di sektor migas melalui kerja sama Pertamina proyek

Oil For Infrastructure di pertengahan tahun 2021,” kata Menlu Retno.

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan juga meningkatkan postur diplomasi Indonesia di kawasan Afrika, menguatkan misi perdamaian Indonesia, dan memberikan perlindungan terhadap WNI di Sudan. “Dapat kami sampaikan pembukaan hubungan diplomatik ini tidak harus segera dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan kedutaan RI di Republik Sudan Selatan. Namun, pelaksanaan kegiatan bilateral dapat dirangkap dari perwakilan RI di negara terdekat,” imbuhnya. ■ ann/sf

Komisi II Tetapkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu



Pimpinan Komisi II DPR RI saat penetapan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Foto: Andri/mvi

Komisi II DPR RI telah menetapkan 7 nama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 pada Kamis (17/2) dini hari. Nama-nama anggota KPU dan Bawaslu itu selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Adapun tujuh Komisioner KPU masa jabatan 2022-2027 terpilih adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan lima anggota Bawaslu 2022-2027 yang lolos terpilih yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Sementara sisa dari seluruh calon yang tidak terpilih

sebagai komisioner KPU dan anggota Bawaslu akan menjadi cadangan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, setelah melalui serangkaian proses dialog dan perdebatan yang panjang, akhirnya diputuskan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Pemilihan anggota KPU dan Bawaslu ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu dari pertimbangan objektif hingga pertimbangan politik.

Dikatakannya, Komisi II melihat integritas, kapasitas kepemiluan, leadership, kemampuan membangun komunikasi, inovasi, kreativitas, hingga aspek kesehatan fisik dan mental calon anggota KPU dan Bawaslu. Komisi II menilainya sejak dari awal proses seleksi di panitia seleksi, hingga dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. "Jadi pertimbangan objektif, pertimbangan

kualitas, itu menjadi pertimbangan utama," ungkap Doli.

Di sisi lain ia juga tak menampik adanya pertimbangan politik dalam memilih anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Doli menilai, kepentingan politik itu adalah kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan mengakomodir semua kekuatan politik yang ada, baik secara formal mewakili rakyat melalui anggota DPR sebagai perwakilannya, serta mewakili partai politik masing-masing.

"Kepentingan politik masing-masing dari kita semua. Tentu yang pertama adalah kepentingan politik bangsa dan negara. Kedua, adalah kepentingan yang mengakomodir semua potensi kekuatan politik yang ada baik itu secara formal mewakili rakyat kita sebagai anggota DPR dan juga mewakili partai politik kita masing-masing," jelas politisi Partai Golkar tersebut. ■ def/sf

Komisi V Pantau Progres Pembangunan Stasiun dan Rel Ganda Rancaekek

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan

Darmawan Aras meninjau secara langsung progres pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek, Bandung, Jawa Barat, yang nantinya berfungsi sebagai prasarana penunjang mobilitas angkutan penumpang dan barang.

Andi Iwan mengatakan, kereta api saat ini merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat sebagai angkutan umum yang terjangkau dan aman. Oleh karena itu diperlukan dukungan prasarana yang memadai dan peningkatan mutu pelayanan perkeretaapian yang optimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi kereta api.

“Komisi V DPR RI mendukung pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan kapasitas lintas, meminimalisir biaya angkutan barang dan distribusi logistik, dan mengurangi beban kepadatan lalu lintas di jalan raya yang dapat berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat,” kata Andi Iwan di sela-sela peninjauan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/2).

Dikatakan politisi Partai Gerindra tersebut, melalui kunjungan kerja spesifik ini, Komisi V DPR RI ingin melihat dan mendengarkan secara langsung progres pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek, serta menginventarisir permasalahan pada pembangunan ini untuk ditindaklanjuti.

Ia menambahkan, Komisi V DPR RI juga meminta kepada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan para *stakeholder*

”

PEMBANGUNAN STASIUN DAN REL GANDA RANCAEKEK DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, MENINGKATKAN KAPASITAS LINTAS, MEMINIMALISIR BIAYA ANGKUTAN BARANG DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

untuk memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sebagai indikator utama dalam mempersiapkan sarana dan prasarana perkeretaapian yang memadai, sehingga masyarakat mendapatkan transportasi yang lancar, aman, dan nyaman.

“Dengan meningkatnya sarana dan prasarana perkeretaapian, diharapkan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kereta api. Kita juga mengharapkan dengan adanya pembangunan stasiun dan rel ganda di stasiun Rancaekek ini dapat memberikan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah, yang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ujar Andi Iwan. ■ skr/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau langsung progres pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek, Bandung. Foto: Singgih/mvl

Sengketa Pelabuhan Bojonegara, Legislator Usul Dibentuk Pansus



Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat mengikuti Kunter Spesifik Komisi V DPR RI. Foto: Fitri/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menyatakan sengketa yang berlarut-larut pada proyek pembangunan Pelabuhan Bojonegara dengan PT Nugra Santana Group selama 25 tahun adalah karena status lahan belum *clear and clean*. Hal itu pun turut memberikan dampak, dimana hingga kini pelabuhan itu belum bisa dioperasikan.

Pelabuhan yang secara administratif berada di wilayah 5°54'38.5"S 106°05'29.3", Pelabuhan Internasional Bojonegara (PIB) Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten itu telah melalui peletakan batu pertamanya di tahun 2003 oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Namun pada perjalanan kasus sengketa, PT. Pelindo II mengalami kekalahan baik di Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Hal itu menurut Sudewo sangat disayangkan.

Ia menerangkan upaya yang dilakukan Pelindo II dengan meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. "Kalau yang dilakukan oleh Pelindo selama ini hanya meminta pendapat hukum dari Kejaksaan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, karena pendapat hukum dari Kejaksaan itu tidak bisa menggugurkan putusan Mahkamah Agung," jelasnya di sela mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan perwakilan PT Pelindo di Cilegon, Banten, Kamis (10/2).

Lebih lanjut ia menilai kasus tersebut adalah sebuah ironi, utamanya adalah

dalam putusan MA posisi lahan yang disengketakan tidak jelas titiknya sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan. Hal itu pun menurut hematnya menimbulkan pertanyaan besar. "Mana mungkin tidak bisa dieksekusi, mana mungkin itu tidak jelas titiknya. Kalau tidak jelas titiknya, pada saat menggugat di Pengadilan Negeri saja, pasti sudah ditolak, tapi ini bisa dimenangkan, di Kejaksaan Tinggi bisa dimenangkan, Mahkamah Agung bisa dimenangkan yang artinya titik yang menjadi objek untuk digugat itu sudah jelas," tegas Sudewo.

Dalam hal ini, Sudewo menyarankan agar Pelindo II melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan menunjukkan bukti baru. Selain itu, pihaknya juga akan mengusulkan ke Komisi V DPR RI agar persoalan itu bisa dibentuk Panitia Khusus (Pansus) mengingat persoalan itu sudah melibatkan lintas institusi.

"Di situlah nanti baru akan diketahui posisi persoalannya, pemetaan masalahnya sehingga kita bisa menentukan akan mengambil langkah hukum, ataukah mengambil langkah kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat. Kami sangat berharap supaya Pelabuhan Bojonegara ini segera selesai persoalan, segera bisa operasional karena begitu tingginya potensi Pelabuhan ini untuk transportasi laut, baik di tingkat domestik, nasional dan internasional," tutup politisi Partai Gerindra tersebut. ■ srw/sf

Komisi VI Sepakat Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H.P. Martin Y Manurung mengatakan, Komisi VI DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Indonesia. Dirinya menegaskan Garuda Indonesia harus diupayakan tetap mengudara sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia.

“Sebagai tindak lanjut dari serangkaian rapat kerja dengan Kementerian BUMN dan jajaran Direksi Garuda Indonesia, kami, Komisi VI DPR RI, pada hari ini telah membentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia. Kami ingin Garuda Indonesia sebagai *flight carrier* yang tetap bisa mengudara sebagai maskapai nasional kebanggaan kita,” ucap Martin usai memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri

BUMN II di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).

Membahas terkait restrukturisasi organisasi PT Garuda Indonesia, politisi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu menegaskan target kerja Panja akan diusahakan selesai pada masa persidangan mendatang. Seiring dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ia berharap bisa dikerahkan secara maksimal.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan apresiasi Panja Penyelamatan Garuda Indonesia. Dalam rapat kerja tersebut, ia menjelaskan turut membahas *business plan* untuk prospek masa depan sekaligus memperdalam opsi-opsi penyelamatan Garuda Indonesia.

“Semua ini masih dalam tahap awal hingga nanti ada serangkaian proses pendalaman. Kami berharap bisa memperoleh dukungan masyarakat, sehingga maskapai nasional kita bisa berkinerja baik terutama membangun bisnis dengan kinerja keuangan yang *sustainable*,” tandas Tiko. ■ ts/sf

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H.P. Martin Y Manurung.
Foto: Munchen/mvl



Komisi VII Terima Laporan Pencemaran Lingkungan di Daerah UPBE Antam Bogor



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin kunspek Komisi VII DPR RI ke UPBE Antam. Foto: Mentari/nvl

Komisi VII DPR RI menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pencemaran Sungai Cikaniki dan kegiatan penambangan ilegal yang ada sekitar Unit Bisnis Penambangan Emas (UPBE) Antam di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menerangkan, pihaknya akan melakukan pendalaman kasus ini dan meminta hasil laporan laboratorium terkait kandungan pencemaran di Sungai Cikaniki.

"Dalam kesempatan ini kita membedah dan mendalami permasalahan lebih lanjut termasuk juga hasil laporan lab terkait kandungan pencemaran yang ada di sungai, yang

kemudian sungai tersebut merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat dari hasil ikannya dan kami sedang mendalami hal tersebut," kata Eddy usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke UPBE Antam, Pongkor, Bogor, Jumat (11/2).

Dalam kesempatan itu, Komisi VII DPR RI juga meminta inspektur pertambangan memberikan masukan yang komprehensif serta langkah selanjutnya yang dilakukan oleh satgas agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. "Kita juga melakukan diskusi dengan direksi Antam tentang langkah-langkah yang akan dilakukan satgas yang telah ditentukan untuk menangani masalah pencemaran ini. Serta langkah kedepannya untuk

mencegah terulangnya permasalahan ini. Karena ini permasalahan yang terjadi sudah berlangsung selama belasan tahun dan tidak ada titik terangnya," terang Eddy.

Dari temuan ini, lanjut Eddy, Komisi VII DPR RI akan membahasnya di Panja Illegal Mining, guna mendapatkan masukan secara tuntas terkait permasalahan pencemaran lingkungan serta upaya penegakan hukum yang konsekuen untuk mencegah terulangnya kembali masalah ini. "Nah ini adalah hal-hal yang kami rasa penting kami sudah pelajari, dalam hal ini dan kami akan tindaklanjuti pembicaraan-pembicaraan tahapan berikutnya," tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. ■ mri/sf

Komisi VIII Pantau Pelayanan Kanwil Kemenag Sulsel



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Kemenag dan Kanwil Kemenag Sulsel. Foto: Sofyan/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka memantau pelayanan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Diah mengatakan, sejumlah hal yang dipantau di antaranya peningkatan mutu pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), pelayanan haji dan umrah terpadu, moderasi umat beragama, serta pengembangan madrasah melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.

“Kita ingin memantau program-program kementerian, yang sudah berjalan di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan,” imbuh Diah usai memimpin pertemuan dengan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid, Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan Khaeroni, dan Kepala

Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Sulsel, di Madrasah Aliyah Negeri-Program Keagamaan (MAN 3-PK) Makassar, Sulsel, Kamis (10/2).

Terkait pemberangkatan haji, Diah memaparkan Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama beserta jajaran sudah mulai membahas persiapan haji. Menteri Agama RI pun sudah bertandang ke Arab Saudi, guna berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, termasuk kementerian yang menangani haji. “Insha Allah haji dapat berjalan dibanding tahun lalu. Bagaimana respon Arab Saudi terhadap haji lebih positif. Kita berharap haji bisa diselenggarakan tahun ini,” harap politisi PDI-Perjuangan itu.

Terkait pelaksanaan haji di masa pandemi ini, Diah berpesan kepada jemaah haji untuk menjaga diri masing-masing dan menjaga jemaah lain. “Artinya saling membantu, karena ada yang usia tua, muda, ada yang kuat, lemah, kami berharap jemaah

Indonesia bisa saling membantu, bekerjasama, saling menguatkan, saling menjaga, sehingga ibadah haji dapat berjalan dengan baik, jemaah kita juga lancar. Karena kan nanti saling membantu itu perlu. Karena nanti banyak aplikasi yang sifatnya digital. Otomatis nanti butuh bantuan,” pesannya.

Terkait pengembangan madrasah, dengan banyaknya jumlah madrasah di Sulsel, sehingga membutuhkan banyak keberpihakan dari pemerintah. Namun Diah melihat kondisi tidak hanya di Sulsel, namun juga di daerah lain. “Pengembangan madrasah baik negeri dan swasta, dan juga peningkatan jumlah penduduk yang membuat pertumbuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan, salah satunya pendidikan Islam itu meningkat. Dan persoalan ini kita tangkap di daerah, sehingga ini harus jadi pembicaraan dan pembahasan khusus (Komisi VIII DPR RI) dengan Kemenag,” kata legislator dapil Jawa Barat III tersebut. ■ sf

Komisi VIII: Data Bantuan Sosial Masih Semrawut

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah selama ini masih bermasalah pada data penerima bantuan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, persoalan krusial ini selalu jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI.

“Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi perdebatan kita. Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka

program sosial menjadi sia-sia,” kata Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan Wali Kota Padang, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/2).

Marwan mengungkapkan, banyak bantuan sosial sama sekali tidak ada penerimanya, karena persoalan data yang salah. Ada yang sudah meninggal, pindah rumah, dan penerima yang tidak ditemukan. Bila saja ada satu juta orang atau keluarga se-Indonesia, lanjutnya, dikali empat juta program yang dikucurkan dalam satu tahun, bisa menjadi Rp40 triliun bantuan uang yang sia-sia lantaran datanya semrawut.

“Sementara di pihak lain, ada masyarakat yang riil menuntut ke wali kota dengan kondisinya yang tidak layak, tapi tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial,” tutur Marwan. Pihaknya menyampaikan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pondasi kesejahteraan sosial juga perlu diperbaiki. DTKS itu meliputi PPKS, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). ■ mh/sf

”

PEMBANGUNAN STASIUN DAN REL GANDA RANCAEKEK DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, MENINGKATKAN KAPASITAS LINTAS, MEMINIMALISIR BIAYA ANGKUTAN BARANG DAN DISTRIBUSI LOGISTIK



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI. Foto: Husen/nvl

RUU Pengawasan Obat dan Makanan Diharapkan Mampu Perkuat Posisi BPOM

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selama ini, menurutnya, Badan POM dalam menjalankan tugasnya, salah satunya melakukan pengawasan terhadap edar obat dan makanan, tanpa dilandasi payung hukum yang kuat.

“RUU ini poinnya banyak sekali, tapi intinya (untuk) memperkuat BPOM, karena selama ini mereka tanggung jawabnya luar biasa menjaga

keseimbangan pangan dan kesehatan masyarakat. Namun payung hukumnya belum kuat, jadi RUU itu untuk memberi payung hukum,” katanya saat memimpin pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan sivitas akademika Universitas Indonesia secara virtual, Kamis (10/2).

“Jadi dalam UU itu mulai persiapan produksi sudah diawasi sampai pembinaan terhadap UMKM. Bisa jadi hasil tes awal produk itu gak lolos di BPOM bukan serta merta ditinggalkan tapi diberi pendampingan agar lolos,” sambung Ninik, sapaan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Taufan/nvl

”

RUU INI POINNYA BANYAK SEKALI, TAPI INTINYA (UNTUK) MEMPERKUAT BPOM, KARENA SELAMA INI MEREKA TANGGUNG JAWABNYA LUAR BIASA MENJAGA KESEIMBANGAN PANGAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

akrab politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Selain itu, adanya RUU tersebut juga memberi kelonggaran bagi Badan POM untuk melakukan tindakan dalam pengawasannya. Pasalnya, lanjut legislator dapi Jawa Timur III ini, selama ini badan tersebut hanya bisa melakukan pengawasan tanpa tindakan bagi pengedar obat dan makanan ilegal.

Ninik menambahkan, dalam penyusunan RUU Pengawasan Obat dan Makanan, Komisi IX DPR RI membutuhkan masukan dari akademisi-akademisi dari perguruan tinggi di Indonesia. “Maka dari itu kita langsung ke Depok, tepatnya Universitas Indonesia untuk meminta masukan dari beberapa fakultas yang memang sesuai dengan RUU tersebut nantinya akan kita serap dan dijadikan bahan pertimbangan ke depannya,” sebutnya. ■ tn/sf



Perlu Pengawasan Terhadap Pengusaha yang Tidak Terapkan SSU di Karawang

atau tidak memiliki struktur skala upah.

“Ini penting, semua harus disiplin jangan sampai kita itu diskusi tentang regulasi tetapi sudah ada regulasi yang nggak diterapkan. Yang kedua, jangan sampai ada perusahaan yang memberikan gaji hanya sebatas UMK meskipun masa kerja pekerjaannya lebih dari 1 tahun, ini yang nantinya harus diikuti dengan struktur dan skala upah tadi,” sambung Edy.

Lebih lanjut Edy mengapresiasi Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK Kabupaten/Kota di

Jabar tahun 2022 yang mengatur tentang struktur dan skala upah sebagai bentuk dari proteksi pemda. “Karena itu bagian dari proteksi pemda yang menjadi wewenang gubernur, agar ada aturan ketika lebih dari satu tahun (bekerja) di Jawa Barat, itu (struktur upah) mengikuti struktur dan skala upah (yang telah ditetapkan),” ujarnya.

Legislator dapil Jawa Tengah III itu menekankan bahwa Keputusan Gubernur

tersebut harus didorong dan didukung oleh bupati-bupati di Jawa Barat. “Tidak perlu bupati membuat peraturan struktur dan skala upah seperti Karawang, nggak perlu, itu wewenang gubernur. Yang dilakukan bupati, eksklusif di lapangan saja kalau membuat aturan sendiri itu namanya duplikasi,” tegasnya.

Untuk itu, Eddy menilai, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah perlu dievaluasi kembali. Menurutnya, Perda tersebut justru malah bertabrakan dengan Perda Gubernur Jawa Barat. “Perda Nomor 1 tahun 2022 yang dari Bupati Karawang itu dievaluasi kembali, malah nanti tabrakan dengan perdanya gubernur. Itu saja yang penting sehingga semua sejahtera,” sebut Edy. ■ [bia/sf](#)



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI foto bersama di Kantor Bupati Karawang. Foto: Bianca/nvi

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai belum semua perusahaan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menerapkan struktur dan skala upah (SSU). Padahal menurutnya, SSU merupakan kewajiban bagi para pengusaha dan merupakan hal yang penting menyangkut kesejahteraan pekerja.

Demikian disampaikan usai pertemuan dengan Bupati Karawang, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, jajaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang, Dewan Pengupahan Jabar dan Karawang, Direksi BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar dan Karawang, APINDO, KADIN, SPSI, KSPI, KSPSI Jabar dan Karawang, di

Kantor Bupati Karawang, Jabar, Kamis (10/2).

“Esensi dari kesejahteraan pekerja bukan hanya UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), UMK hanya menyisir sebesar 5 persen pekerja baru, tapi yang lebih banyak 90 persen adalah pekerja yang lebih dari 1 tahun masa kerjanya dan jaminan kesejahteraan itu tergantung pada struktur dan skala upah yang ditentukan oleh perusahaan,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Oleh sebab itu, menurut Edy, harus ada advokasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Karawang, pengawas tenaga kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Asosiasi Pekerja serta aparat penegak hukum untuk dapat mengawasi pengusaha-pengusaha yang tidak menerapkan

Sosialisasi Prolegnas RUU, Baleg Berharap Masyarakat Berikan Masukan



Wakil Ketua Baleg DPR RI Abdul Wahid bertukar cenderamata dengan Wakil Gubernur Riau. Foto: Hira/nvl

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mensosialisasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 di Pekanbaru, Riau. Dalam Kunjungan Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Abdul Wahid tersebut, Baleg DPR RI juga menyerap aspirasi dan masukan dari Forkopimda masyarakat Riau.

“Agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, yang pada akhirnya setiap RUU yang akan

ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” jelas Wahid ketika menyampaikan sambutan di Pekanbaru, Rabu (9/2).

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2022, DITETAPKAN SEBANYAK 40 RUU DAN PERUBAHAN PROLEGNAS TAHUN 2020-2024 DITETAPKAN SEBANYAK 254 RUU

Perundang-undangan, wujud konkret dari tahap perencanaan berbentuk Prolegnas. Prolegnas tersebut, lanjut Wahid, ada yang berbentuk Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan ada yang berbentuk Prolegnas Prioritas tahunan. Prolegnas prioritas tahunan ditetapkan setiap tahun dan disusun berdasarkan Prolegnas jangka menengah.

“Prolegnas disusun oleh DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah RI. Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Ketentuan tersebut, mutatis-mutandis juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, berikut perubahannya,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.

Wahid juga menerangkan, berdasarkan kewenangan tersebut, Baleg DPR RI telah menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Prolegnas tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, sebagaimana ternyata dalam Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, tertanggal 7 Desember 2021.

“Berdasarkan Keputusan DPR RI tersebut, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, ditetapkan sebanyak 40 RUU dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 ditetapkan sebanyak 254 RUU. Selanjutnya berdasarkan tugas yang dimilikinya juga, Badan Legislasi mempunyai kewajiban mensosialisasikan Prolegnas dimaksud kepada masyarakat,” sambung politisi asal Riau ini.

Di akhir, dirinya menyampaikan bahwa di samping terserapnya aspirasi masyarakat dan pemerintah di daerah, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi sarana dari terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. ■ hal/sf

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas 2020-2024. Pimpinan Tim Kunker, Anggota Baleg DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, dalam forum sosialisasi itu pihaknya memperoleh banyak masukan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi undang-undang.

“Dari forum ini kami bisa mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa. Karena memang yang diundang dari Pemerintah DIY ini memang mereka yang berkompeten terkait dengan perencanaan peraturan penyusunan peraturan perundangan maupun karena pelaksanaan undang-undang di dalam kesehariannya,” jelas Esti usai sosialisasi Baleg DPR RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, di Yogyakarta, Rabu (9/2).

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu berharap semua masukan yang diterima Baleg DPR RI terkait bagaimana dengan partisipasi publik, sudah diupayakan DPR RI dalam setiap pembahasan RUU. “Supaya publik bisa terus bisa memberikan masukan yang memberikan kemanfaatan pada rancangan seluruh rancangan undang-undang,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) DIY itu.

Adapun dari pertemuan itu, ia menemukan masih terdapat masyarakat yang belum

Baleg Dorong Partisipasi Publik dalam Sosialisasi Prolegnas di Yogyakarta

mengetahui bagaimana cara menyampaikan pendapatnya terkait dengan masukan dalam pembahasan RUU. Padahal saat ini masyarakat tetap bisa memberikan masukan terhadap perancangan undang-undang melalui saluran digital.

Sementara itu Esti menegaskan beberapa masukan lain yang pihaknya harapkan nanti akan ditindaklanjuti oleh DPR RI di bidang legislasi. “Supaya undang-undang yang kami hasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh

masyarakat dan sesuai dengan metode-metode yang diharapkan masyarakat juga,” pungkas Esti. ■ ah/sf

Anggota Baleg DPR RI MY Esti Wijayati.
Foto: Agung/nvl

”

SUPAYA PUBLIK BISA TERUS BISA MEMBERIKAN MASUKAN YANG MEMBERIKAN KEMANFAATAN PADA RANCANGAN SELURUH RANCANGAN UNDANG-UNDANG



BKSAP DPR Targetkan Bahasa Melayu jadi *Working Language* di Pertemuan IPU dan AIPA



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemprov Kepri dan Pemkot Tanjung Pinang. Foto: Ridwan/nvl

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menargetkan Bahasa Melayu akan menjadi bahasa kerja (*working language*) dalam momentum Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Perkumpulan Antar-Parlemen Dunia pada 20-24 Maret 2022 dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly di tahun mendatang. Sebab, Bahasa Melayu, tambahnya merupakan bahasa tuturan mayoritas yang digunakan masyarakat di ASEAN.

“Targetnya sebagai bahasa kerja di IPU dan juga di ASEAN melalui AIPA. Ini target dari BKSAP ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan di tempat ini di Kota Tanjung Pinang sebagai Kota Gurindam 12, masukan

dari para tokoh budayawan, pejabat, dan akademisi ini menjadi pengayaan untuk jadi acuan sinergi ke depan,” ujar Fadli usai memimpin pertemuan persiapan pembentukan Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Melayu (AAPBM), di Gedung Sekda, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (11/2).

Diketahui, terdapat kurang lebih 700 dialek Bahasa Melayu yang tersebar di beberapa negara, baik di dalam ASEAN sendiri maupun di beberapa negara yang memiliki fakta sejarah penyebaran budaya Melayu sejak era penjajahan. Namun, Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, yang paling ditekankan bukanlah Melayu dalam konteks bahasa tutur (dialek), melainkan bahasa tulis.

“Kalau dialek bisa bermacam-macam. Di Inggris, Mandarin, juga banyak ragam dialeknnya. Jadi, kita bukan mau cari perbedaan dari dialek mana, tapi bahasa tulis Melayu yang berangkat dari Bahasa Indonesia oleh Raja Ali Haji sampai sekarang penutur Bahasa Melayu di Kepri yang ini terus digunakan,” tambah Fadli Zon.

Jika Bahasa Melayu ini nantinya diterima sebagai *working language* tersebut, ia berharap, misalnya budaya pantun sebagai satu ciri Melayu dapat digunakan sebagai penutup dan pembukaan misalnya saat pidato internasional. “Karena pantun ini bisa diterima di seluruh Indonesia. Itu juga cara kita membuka dan menutup pertemuan. Bisa juga ini dijadikan tradisi dalam pertemuan internasional, baik di pemerintahan maupun parlemen,” urai Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

Sehingga, meskipun dalam waktu dekat AAPBM ini masih belum dapat dibentuk, namun setidaknya Bahasa Melayu dapat digunakan terlebih dahulu di forum-forum internasional. “Saya memang waktu itu yang inisiatif dan diterima di BKSAP dan DPR RI. Jadi tinggal kita perkuat argumentasi ini dan kita tawarkan kepada teman-teman kita di parlemen di beberapa negara penutur Bahasa Melayu,” tutup Fadli Zon.

Hadir dalam pertemuan AAPBM tersebut di antaranya Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Penjabat Sekda Provinsi Kepri, Wakil Rektor Univ Maritim Raja Ali Haji 2, Ketua STISIPOL Tanjung Pinang, dan beberapa pejabat struktural Provinsi Kepri lainnya. ■ rdn/sf

BURT Pantau Layanan RS *Provider* Jamkestama di Medan

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, dalam rangka mengetahui kesiapan dan fasilitas rumah sakit *provider* asuransi Jasindo di kota tersebut yakni Rumah Sakit Advent Medan. Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengapresiasi paparan oleh manajemen RS Advent Medan dan perwakilan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

“Saya menanyakan beberapa hal terkait dengan posisi rumah sakit itu seperti bagaimana sarana prasarananya. Terus yang berikutnya adalah apa spesialisasinya. Sudah disampaikan spesialisasi urologi,” ujar Dimiyati usai memimpin pertemuan dengan manajemen RS Advent Medan dan Jasindo di Medan, Sumut, Jumat (11/2).

Politisi PKS itu pun mengapresiasi fasilitas yang dimiliki RS Advent. Namun ia berpesan agar manajemen tetap mempertimbangkan untuk terus

meningkatkan segala sarana dan prasarana yang ada. Segala fasilitas itu akan berdampak positif tidak hanya bagi pemegang kartu Jamkestama, tapi juga masyarakat umumnya.

Adapun berdasarkan pertemuan ini, BURT, kata Dimiyati akan menyampaikan kepada seluruh Anggota Dewan dan keluarga serta para pejabat negara lainnya dapat memanfaatkan layanan RS Advent Medan, jika berada di lokasi sekitarnya. “Kami pun merekomendasikannya. Apabila ada yang mau *ngecek* atau ingin berobat ada penyakit-penyakit tertentu bisa dikonsultasikan ke dokter di sini,” ujar legislator dapil Banten I tersebut.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Program Jamkestama telah diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2014. Ditambah pula aturan pelaksanaannya Permenkes Nomor 55 Tahun 2014 dan Permenkeu Nomor 167/PMK/02/2014. Dimiyati menegaskan bahwa dari hasil pemaparan dan peninjauan tim BURT, rumah sakit yang menjadi *provider* asuransi Jasindo kali ini dinilai cukup memadai fasilitasnya. ■ ah/sf



Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah. Foto: Agung/nvl

Menyambut rencana pertemuan tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-144, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P.H. Sitorus menegaskan isu perubahan iklim harus jadi salah prioritas program pembangunan pemerintah. Dirinya menerangkan, dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), yang turut mengatur pajak karbo, dapat membantu Indonesia mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC).

“Parlemen berperan strategis memastikan implementasi SDGs. Peran konkret DPR RI terkait isu perubahan iklim, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target *Nationally Determined Contribution*, serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi,” ucap Sihar dalam paparannya membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDG’s Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan parlemen memastikan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) bisa dipenuhi di Indonesia, terutama terciptanya *climate justice*. Mewakili rakyat Indonesia, lanjut Sihar, DPR RI mendukung upaya tercapainya penanganan perubahan iklim melalui empat fungsi, mulai dari legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.

Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan itu menilai pertemuan tahunan IPU Assembly ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret mendatang, berpotensi membuka kesempatan bagi antar parlemen dunia untuk berbagi informasi sekaligus praktik terbaik, dalam konteks menyikapi perubahan iklim. Sehingga, pertukaran pengalaman tersebut mendorong inovasi, satu di antaranya *green economy*.

Jadi Tuan Rumah IPU Assembly ke-144, BKSAP DPR RI Sosialisasi ke IPB



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar P.H. Sitorus bersama Pimpinan BKSAP DPR RI bertukar cenderamata dengan Rektor IPB. Foto: Saum/nvl

Pada kesempatan yang sama, Rektor IPB Arif Satria menekankan persoalan lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim, perlu dilihat dari sudut pandang yang holistik, termasuk melalui perspektif tata kelola yang baik dan juga politik. IPB, menurut Arif, memiliki akademisi-akademisi yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan tetapi juga berpengalaman menangani isu perubahan iklim.

Senada dengannya, Wakil Rektor IPB Dodik Ridho Nurrochmat mengingatkan agar Indonesia membangun inisiatif dunia soal *climate justice* pada pertemuan IPU Assembly ke-144 nanti. Baginya,

climate justice merupakan amanat konstitusi Indonesia di mana Indonesia terikat dengan instrumen hukum internasional bersama negara lainnya untuk segera mengatasi perubahan iklim global.

Sebagai informasi, DPR RI akan menjadi tuan rumah IPU Assembly ke-144 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 20-24 Maret 2022 mendatang. Dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’, BKSAP DPR RI melaksanakan sosialisasi ke IPB untuk berdiskusi tentang bagaimana diplomasi parlemen dapat berperan maksimal dalam isu perubahan iklim, bersama para akademisi IPB. ■ ts/sf



Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi saat memimpin pertemuan dengan Direktur beserta manajemen dan tenaga medis RS Siloam Sriwijaya. Foto: Hanum/nvl

BURT DPR Apresiasi Fasilitas dan Sarpras RS Siloam Sriwijaya Palembang

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi pun memberikan apresiasi terhadap fasilitas, hingga sarana dan prasarana yang dimiliki RS Siloam Palembang.

“Kalau dilihat dari penjelasan Direktur Rumah Sakit Siloam Palembang, saya kira fasilitas-fasilitas yang ada di RS Siloam Palembang sudah cukup memadai dan bahkan beberapa pelayanannya juga sudah baik,” jelasnya usai memimpin pertemuan Tim BURT DPR RI dengan Direktur beserta manajemen dan

tenaga medis RS Siloam Sriwijaya, di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/02).

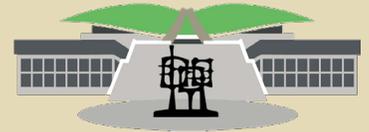
Johan menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR beserta keluarganya, yang dilaksanakan RS Siloam Sriwijaya Palembang sebagai RS *provider* PT Asuransi Jasindo.

“*Concern* saya di sini adalah bagaimana mereka (RS Siloam) berhubungan (berkomunikasi) dengan Anggota DPR RI dan keluarganya ketika mereka berobat ke Siloam. Karena tadi ada beberapa kendala yang disampaikan (oleh pihak RS

Siloam Palembang),” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI tersebut, salah satu permasalahan yang sering kali muncul yaitu mengenai proses administrasi di RS *provider*. Tidak sedikit dari RS *provider*, belum memiliki prosedur standar pelayanan program Jamkestama.

“Nanti di dalam rapat BURT saya mengusulkan agar ada semacam *report* yang dilakukan dari Jasindo terhadap rumah sakit-rumah sakit mitra yang bekerjasama dengan Jasindo. Yang kemudian bisa kita evaluasi kembali bagaimana pelayanan yang diberikan oleh mitra-mitra Jasindo. Termasuk PT Asuransi Jasindo sendiri kita bisa evaluasi,” tegas Johan. ■ hnm/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan pihak terkait lainnya meninjau lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2). Foto: Bonis/nvl



Rapat Pleno BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menetapkan Gilang Dhiela Fararez sebagai Wakil Ketua BKSAP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2). Foto: Mentari/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin rapat koordinasi persiapan Penyelenggaraan 144th IPU Assembly bersama kementerian/lembaga terkait, di Jakarta, Kamis (10/2). Foto: Mentari/nvl

